

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Setiap pemerintah daerah memiliki instrumen kebijakan yang utama yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, yaitu anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk (Mahsun dkk, 2006 : 83) :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu

tahun) (Halim, 2004 : 267). APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana oleh pemda dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat melalui DPRD yang berorientasi kepada kepentingan publik. APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu tahun anggaran. Pentingnya penyusunan APBD adalah (Halim, 2004 : 4):

1. Menentukan jumlah pungutan pajak dan retribusi daerah dan pungutan lainnya yang dilakukan kepada masyarakat.
2. Merupakan sarana mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kekuasaan kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu.

Definisi APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

daerah. APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 berpedoman kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Proses penyusunan APBD diawali dari penyusunan RKPD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Salah satu tahapan penyusunan APBD adalah pengesahan RAPBD menjadi APBD. Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2007 pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung tidak terlalu terlambat. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengesahan APBD dilakukan satu bulan sebelum Tahun Anggaran yang berkenaan atau selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, dalam hal ini 31 Desember 2006. Namun, pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengesahan APBD tahun anggaran 2007 dilaksanakan pada 22 Januari 2007. Terlambatnya penetapan APBD akan dapat menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan tahapan penyusunan APBD seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

I.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses penyusunan APBD sudah dikatakan sesuai apabila sesuai dengan tahapan proses penyusunan APBD seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Evaluasi proses penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 berdasarkan tiap-tiap tahapan penyusunan APBD.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyusunan APBD dengan tahapan penyusunan APBD seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi Pemda untuk mengetahui sejauh mana peranan masyarakat termasuk DPRD dalam proses penyusunan APBD.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai proses penyusunan APBD.

I.6. Metode Penelitian

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah rancangan APBD pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007. Penelitian dilakukan di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Data Penelitian

Data-data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, adalah:

1. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan APBD Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk waktu pembahasan APBD.
2. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2007.
3. Nota Keuangan Rancangan APBD Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007.

4. Surat Edaran Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
5. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007.
6. Gambaran Umum Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data-data tersebut di atas dapat diperoleh dengan mengumpulkan data tertulis dan mengadakan tanya jawab ke Bagian Keuangan khususnya Bagian Anggaran, Bagian Penyusunan Program, Bagian Pusat Data Elektronik, dan BAPPEDA Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab ke bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan, yaitu Bagian Keuangan khususnya Bagian Anggaran dan Bagian Penyusunan Program di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data sekunder dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis dari Bagian Keuangan, Bagian Penyusunan Program, Bagian Pusat Data Elektronik dan BAPPEDA Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Metode Analisis Data

1. Melakukan evaluasi tahapan proses penyusunan APBD Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tahapan proses penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Penyusunan rancangan KUA yang selanjutnya disepakati menjadi KUA berdasarkan RKPD.
 - c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
 - e. Penyiapan Raperda APBD.
 - f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - h. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
2. Menarik kesimpulan dan membuat saran dari hasil analisa.

I.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini akan membahas mengenai keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, APBD, dan proses penyusunan APBD.

**BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Bab ini akan membahas gambaran umum Pemda Provinsi NTT, yang meliputi: kondisi geografis, kondisi sosial, sumber daya alam, perekonomian dan APBD.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas analisis tahapan penyusunan APBD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

